

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Difabel Blora Mustika (DBM) di Kabupaten Blora

1. Profil Difabel Blora Mustika (DBM)

Difabel Blora Mustika (DBM) adalah Sebuah Kelompok/Organisasi Difabel (penyandang disabilitas), dalam istilah internasional sering disebut dengan Difiable People Organization (DPO). Difabel (disabilitas) yang beranggotakan semua difabel dan orang yang mengalami kusta (OYPMK). DBM terbentuk pada tanggal 10 Oktober 2011 yang beranggotakan 9 orang aktif dan 120 data difabel. Tahun 2012 bertambah menjadi 15 orang anggota aktif. Seiring berjalannya waktu DBM mulai dikenal masyarakat dan pemerintahan, pada tahun 2013 beranggotakan 20 Difabel aktif dan menambah pengurus operator di 16 kecamatan se-kabupaten Blora dan menambah data 250 difabel. tahun 2014 anggota aktif DBM bertambah menjadi 30 orang dan 350 data difabel dan 16 cabang kecamatan. Tahun 2015 DBM (Difabel Blora Mustika) mengikuti aturan pemerintah syarat sah menjadi organisasi resmi, termasuk Persyaratan Akta Notaris dan MENKUMHAM. Nama DBM (Difabel Blora Mustika) menjadi resmi sampai saat ini. Menjadi satu-satunya wadah persatuan dan perkumpulan difabel di seluruh kabupaten Blora.

Dulunya tanggal 10 Oktober 2011 DBM masih berjalan apa adanya karena keterbatasan dana dan belum banyak pihak yang mendukung hingga mengalami kemunduran. DBM mulai maju sejak tanggal 10 Oktober 2013 bermitra dengan Netherlands Leprosy Relief (NLR) Jakarta dan Pusat Pengembangan Pelatihan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (PPRBM) Surakarta. Dengan dukungan program pemberdayaan dan advokasi difabel mitra diatas, Sejak itulah DBM mulai berkembang dan diterima di tengah-tengah masyarakat dan semua pihak serta pemkab membuka akses untuk menerima keberadaan DBM.

Maksud dan tujuan Difabel Blora Mustika (DBM) adalah advokasi dan bekerja sama dengan pemerintah dan atau dengan pihak lain untuk mencapai kesamaan kebijakan dalam segala aspek kehidupan bagi penyandang disabilitas dan kusta. Ber-SK Dinas Nakertransos No. 460/917/2013 dan Akta Notaris – 39 – Tgl 25 agustus 2014, sekarang berubah menjadi SK

Dinas Nakertrans No. 460/917/2013 Akta Notaris -16- Tanggal 07 September 2015 disahkan MENKUMHAM No. 6015091633101353. Sekarang DBM menjadi organisasi resmi difabel yang berkedudukan di Kabupaten Blora, Beranggotakan 753 Difabel dan OYMK, terbentuknya 16 Pengurus DBM ditingkat Kecamatan. Kesekretariatan DBM Beralamatkan di Jln. Hasanuddin Depan SMP 03 Blora Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah Indonesia.

Saat ini keanggotaan dan kepengurusan DBM dibagi menjadi 16 (enam belas) kelompok kecil, masing-masing kelompok ada pengurus yang dipilih oleh anggota kelompoknya. Meskipun masing-masing kelompok bersifat mandiri, namun ada pertemuan bersama 16 kelompok setiap 3 bulan sekali untuk sharing perkembangan dan pengalaman. Untuk mewakili DBM ditingkat kabupaten, ada seorang ketua umum dan wakil umum tingkat kabupaten yang dipilih dari kepengurusan kelompok kecil tersebut.

Kegiatan DBM adalah bertujuan untuk pemberdayaan anggota DBM melalui pelatihan, kegiatan usaha produktif, usaha simpan pinjam, kerjasama usaha, dan sebagainya. Keberadaan DBM juga bertujuan untuk melakukan pendataan dan kajian sosial ekonomi difabel di Kabupaten Blora, dan melakukan kampanye dan advokasi dalam rangka memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi anggota DBM khususnya dan difabel di Kabupaten Blora pada umumnya.¹

2. Visi dan Misi Difabel Blora Mustika (DBM)

Visi

“Terwujudnya Indonesia Inklusi Disabilitas”

Misi

- a. Mewujudkan adanya perlindungan terhadap hak-hak difabel
- b. Mewujudkan Warga difabel yang kompak dan bersatu
- c. Mewujudkan adanya pemetaan warga penyandang disabilitas
- d. Mewujudkan pemberdayaan penyandang disabilitas
- e. Adanya modal usaha untuk penyandang disabilitas dan OYPMK. Yang mempunyai usaha sendiri

3. Motto dan Nilai Difabel Blora Mustika (DBM)

Motto : Keterbatasan bukanlah kekurangan untuk menatap masa depan adanya seyuman dan semangat menuju kesuksesan.

¹ <https://indonesiainklusi.id/informasi/kabar/kunjungan-sofi-institute-ke-difabel-blora-mustika/>

Nilai : Kebersamaan, Persaudaraan, Kekeluargaan, Kemandirian, Keterbukaan, dan Kejujuran.

4. **Struktur Organisasi Difabel Blora Mustika (DBM)**

Tabel 4.1 Susunan kepengurusan Organisasi Difabel Blora Mustika (DBM) Tahun 2020

No	Jabatan	Nama
1.	Dewan Pembina	Kepala Dinas Se-Kabupaten, Blora
2.	Pembina	Sunarman (Direktur PPRBM Solo)
3.	Ketua	Moh. Abdul Ghofur, S. Pd, I
4.	Wakil Ketua	Kandar
5.	Sekretaris	1. Arif Rahman 2. Gemi
6.	Bendahara	1. Masroji 2. Siti Muntarin
7.	Pengawas	1. Sriyono S. Pd, I 2. M. Sri Sulistiyanto, S.pdi
8.	Ketua Cabang kec, Blora	Sukamto
9.	Ketua Cabang kec, Jepon	Sarpan
10.	Ketua Cabang kec, Jiken	Muri Muryanto
11.	Ketua Cabang kec, Bogorejo	Darman
12.	Ketua Cabang kec, Banjarejo	Kardito
13.	Ketua Cabang kec, Tunjungan	Awan Purwanto
14.	Ketua Cabang kec, Ngawen	Wahyudi
15.	Ketua Cabang kec, Kunduran	Lasminto
16.	Ketua Cabang kec, Japah	Eko Pramono
17.	Ketua Cabang kec, Todanan	Kastupi Edi Purwanto
18.	Ketua Cabang kec, Cepu	Suyanto
19.	Ketua Cabang kec, Sambong	Hartono. S.pd I
20.	Ketua Cabang kec, Kedung Tuban	Prastiyo
21.	Ketua Cabang kec, Kradenan	Yasir
22.	Ketua Cabang kec, Randublatung	Damirin
23.	Ketua Cabang kec, Jati	Yahmin
24.	Anggota	16 Kecamatan

Sumber : Dokumentasi Disabilitas Blora Mustika

5. Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Blora

Tabel 4.2: Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Blora Tahun 2020

No	Kategori Penyandang Disabilitas	Dewasa	Anak	Jumlah
1.	Mental	35	9	44
2.	Tuna Grahita	346	162	508
3.	Laras	305	33	338
4.	Tuna netra	353	25	378
5.	Tuna daksa	799	180	979
6.	Insan tuli	334	89	423
7.	Ganda	98	61	159

Sumber: Difabel Blora Mustika pada tahun 2020

Tabel 4.3 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Blora Tahun 2021

No.	Kategori Penyandang Disabilitas	Dewasa	Anak	Jumlah
1.	Mental	37	9	46
2.	Tuna Grahita	346	162	508
3.	Laras	307	33	340
4.	Tuna netra	353	25	378
5.	Tuna daksa	800	180	980
6.	Insan tuli	334	89	423
7.	Ganda	98	61	159

Sumber: Difabel Blora Mustika pada Tahun 2021

Tabel 4.4 Jumlah Penyandang Disabilitas Blora Mustika Tahun 2022

No.	Kategori Penyandang Disabilitas	Dewasa	Anak	Jumlah
1.	Mental	40	10	50
2.	Tuna grahita	346	162	508
3.	Laras	310	37	347
4.	Tuna netra	353	27	380
5.	Tuna daksa	800	180	980
6.	Insan tuli	336	90	425
7.	Ganda	98	62	200

Sumber: Difabel Blora Mustika pada Tahun 2022

6. Program di Difabel Blora Mustika

a. Pembuatan Kain Batik

Organisasi Difabel Blora Mustika (DBM) berupaya untuk memberdayakan para penyandang disabilitas dengan cara memenuhi hak-hak yang mereka dapatkan. Pada dasarnya penyandang disabilitas membutuhkan sebuah dorongan, motivasi sehingga terbentuknya kepercayaan diri untuk berinteraksi sosial di masyarakat tanpa ada hambatan. Sebelum adanya organisasi ini, para penyandang disabilitas kurang ada perhatian, mendapatkan kesamaan hak, kurang percaya diri, mengurung diri dirumah dan tidak memiliki pekerjaan. Terbentuknya organisasi ini untuk memperjuangkan mereka agar mendapatkan kesamaan atas hak. Beberapa pelatihan telah diberikan kepada mereka diantaranya adalah membuat keset dari kain perca, kerajinan, menjahit dan juga membatik. Namun, sekarang lebih terfokus ke pembuatan kain batik dikarenakan harga jual dan pemasaran lebih mudah sehingga pendapatan mereka lebih banyak.¹

Pelatihan-pelatihan serta pendampingan diadakan bertujuan memberi bekal kepada penyandang disabilitas agar memiliki keterampilan khusus atau kemampuan, Salah satunya adalah membatik. Para penyandang disabilitas di Difabel Blora Mustika memproduksi kain batik. Tujuan diberikan pemberdayaan untuk para penyandang disabilitas melalui keterampilan membatik ini adalah mengasah skill mereka dan tidak bergantung pada orang lain. Adapun kategori penyandang disabilitas yang membatik yaitu tuna grahita, tuna daksa, tuna rungu, tuna netra, oympmk (kusta).

Tabel 4.5 Daftar penyandang disabilitas yang membatik di Difabel Blora Mustika

No	Nama Lengkap	Alamat	Kategori Penyandang Disabilitas
1.	Yepi Anjar Listiana	Buluroto, kec.Banjarrej0	Tunadaksa
2.	Nur Kholis	Klopoduwur, kec. Banjarrejo	Tunadaksa
3.	Siti Asiyah	Glebur, Jiken	Tunadaksa
4.	Siti Musafaatin	Sendang Wungu, Kec. Banjarejo	Tunadaksa

No	Nama Lengkap	Alamat	Kategori Penyandang Disabilitas
5.	Yuliana	Sendang Wungu, Kec. Banjarejo	Low Vision
6.	Siti Khoirun Nikmah	Klopoduwur, kec. Banjarejo	Tunadaksa
7.	Heri	Buluroto, Kec. Banjarejo	Tunadaksa
8.	Lasiman	Buluroto, Kec. Banjarejo	OYPMK
9.	Sarpan	Turirejo, kec. Jepon	Tunadaksa
10.	Rahman	Gedongsari, kec. Banjarejo	Tuna daksa (amputasi satu kaki)
11.	Liil Yatul Asna Fauziah	Buluroto, kec. Banjarejo	Tunadaksa
12.	Damin	Banjarejo kec. Banjarejo	OYPMK
13.	Sukan	Kamoln, Kota Blora	Amputasi dua tangan
14.	Sofi Nurlaila Hanum	Turirejo, kec. Jepon	Tunadaksa
15.	Siti	Buluroto, Kec, Banjarejo	Tunadaksa
16.	Nur Rohmadi	Jepon, kec. Jepon	Tunadaksa
17.	Supad	Klopoduwur, kec. Banjarejo	Tunadaksa
18.	Emi	Sendangwungu, kec. Banjarejo	Tunadaksa
19.	Jono	Gedongsari, kec. Banjarejo	Amputasi satu
20.	Sular	Kamoln, Kota Blora	Tunadaksa
21.	Agung Rudi Andriyanto	Beran, Kota Blora	Low Vision
22.	Lasminto	Klokah, Kec. Kunduran	Tunadaksa
23.	Aleg Susanto	Buloh, Kec. Kunduran	Amputasi dua
24.	Kastur	Sumberagung, Kec. Banjarejo	Tunadaksa
25.	Muri Muryanto	Cabak, kec. Jiken	Tunadaksa

No	Nama Lengkap	Alamat	Kategori Penyandang Disabilitas
26.	Gemiatun	Buluroto kec Banjarejo	
27.	Surip	Nglembak, kec Kradenan	
28.	Sofiyatun	Tutup, kec Tunjungan	

Sumber: Dokumentasi Difabel Blora Mustika tahun 2023

Adapun jenis-jenis batik yang dihasilkan oleh para penyandang disabilitas di Difabel Blora Mustika meliputi

- 1) Batik cap, merupakan batik yang dibuat dengan semacam setempel motif batik. Stempel atau cap tersebut terbuat dari tembaga yang fungsinya menggantikan canting sehingga dapat mempersingkat waktu pembuatan batik.
- 2) Batik tulis, merupakan jenis batik yang dibuat secara manual menggunakan tangan dengan bantuan alat canting untuk merekan malam kecorak batik
- 3) Batik ciprat, merupakan batik yang dibuat dengan teknik ciprat warna abstrak yang akhir-akhir ini sedang banyak diminati konsumen.
- 4) Batik alami, merupakan batik yang dibuat menggunakan bahan alami dari alam. Dalam proses pembuatan atau produksi batik mereka tidak hanya menggunakan bahan pewarna sintetis. Mereka juga memanfaatkan beberapa dari limbah yaitu dari gedhebok pisang. Gedhebok pisang pada umumnya hanyalah limbah yang dibiarkan setelah pemanenan atau pengambilan buah pisang. Mereka memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai pewarna untuk membuat motif batik pada kain. Selain gedhebokpisang, mereka juga menggunakan seledri, mahoni dan lain sebagainya.

Perancangan motif batik dilakukan oleh para penyandang disabilitas itu sendiri dan diarahkan oleh Difabel Blora Mustika. Ada beberapa motif yang dihasilkan yang memiliki ciri khas dari daerah maupun dari disabilitas itu sendiri diantaranya:²

² Munasaroh, Siti Ani, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, (UIN Walisongo Semarang: Skripsi, 2019).

1) Motif disabilitas

Dengan adanya gambar disabilitas pada motif kain batik bertujuan untuk memperkenalkan atau memperlihatkan bahwa disabilitas juga mampu untuk berkreasi seperti halnya orang pada umumnya. Kain batik bermotif ini dinamai dengan motif difabel mengejar mimpi. Daerah Blora tidak hanya terkenal dengan makanan ciri khasnya saja melainkan juga akan produksi kain batik. Dengan adanya motif ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya dari daerah kepada masyarakat luar daerah yaitu dengan motif kain batik daun jati Blora.

“Kain batik yang motif daun jati ini sebenarnya untuk memperkenalkan ke-khasan kepada daerah lain bahwa itu termasuk ciri khas daerah kita, Mbak dan juga kita masih menggunakan budaya yang dulu” (wawancara dengan Bapak Ghofur pada tanggal 15 Mei 2023)¹

2) Motif Asean Games dan Kemerdekaan

Para disabilitas di Difabel Blora Mustika tidak hanya memproduksi kain batik dengan motif biasa namun juga menyesuaikan kondisi yang dialami. Misalnya, pada asean games dan kemerdekaan. Mereka para penyandang disabilitas juga memproduksi kain batik dengan motif asean games dan kemerdekaan. Tujuan pembuatan ini melainkan untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia dan juga memberikan atau memperkenalkan kepada manca negara bahwa Indonesia masih kental akan budaya salah satunya batik. Dan banyak lagi motif lainnya yang diproduksi oleh para penyandang disabilitas.³

“Untuk motif batik sebenarnya banyak mbak, tetapi terkadang juga sesuai dengan kondisi, kemarin juga temen-temen difabel juga membuat motif kain batik bercorak asean games dan juga kemerdekaan. Sebisa mungkin kita juga membuat inovasi baru dan lebih kreatif lagi” (wawancara dengan Bapak Ghofur pada tanggal 15 Mei 2023).

³ Sholikhatun, Wuri, Peran Badan Sosial Mardiwuto dalam Pemberdayaan Difabel Netra di Yogyakarta. (Yogyakarta: Skripsi, 2015).

b. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam pada umumnya berupa kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Tujuan adanya kegiatan ataupun program ini melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Namun di Difabel Blora Mustika tidak hanya ada koperasi simpan pinjam saja melainkan ada juga kegiatan rutin yaitu arisan, dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi untuk para penyandang disabilitas. Program ini juga diperuntukkan kepada para penyandang disabilitas yang ingin membuka usaha berupa bantuan pinjaman permodalan

“tujuannya terbentuknya kegiatan koperasi simpan pinjam untuk memudahkan kepada para temen-temen penyandang disabilitas untuk menabung dan sebagainya. Memang ada bunganya yaitu 0,5% tetapi menurut saya tidak bunga yang besar. Dan juga ada kegiatan arisan untuk temen-temen difabel agar ada kegiatan pertemuan rutin untuk membahas hal-hal yang penting dan pastinya juga mbak untuk mempererat tali siraturahmi” (wawancara dengan Bendahara Siti Muntarin 15 Mei 2023).¹

c. Gerakan Koin Peduli Umat

Gerakan koin peduli umat merupakan kegiatan mengumpulkan uang receh atau koin oleh para penyandang disabilitas. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menghilangkan stigma-stigma negatif kepada disabilitas bahwa mereka hanya perlu dikasihani ataupun disantuni. Dengan adanya program ini mereka membuktikan bahwa penyandang disabilitas walaupun memiliki keterbatasan fisik mereka juga dapat memberikan manfaat dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Gerakan koin disabilitas Blora mustika sesudah berjalan 6 tahun hal ini karena mereka sudah dan paham disaat kita tak punya, disaat kita kekurangan, disaat kita jatuh.

Gerakan ini pada awalnya dimaksudkan dan akan digunakan untuk disumbangkan kepada mereka para disabilitas yang membutuhkan alat bantu seperti kaki palsu, kursi roda, tongkat crack, alat bantu dengar, dan alat bantu lain yang mendukung dan membantu penyandang disabilitas. Namun, seiring berjalannya waktu, gerakan koin ini juga di

salurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Seperti halnya: sumbangan untuk pembangunan sekolah, kurban, sedekah kepada anak-anak yatim piatu, panti asuhan dan lain-lain.

“Memang Mbak pada awalnya gerakan koin peduli umat ini digunakan untuk para penyandang disabilitas yang membutuhkan kaki palsu, kursi roda, dan lain sebagainya. Namun kita juga ingin membantu para sesama yang membutuhkan uluran tangan dan juga berbagai, ya itu dengan hasilnya diberikan semua kepada orang yang membutuhkan. Itupun koinnya di ambil 1 bulan sekali, uang koin kan biasanya tidak terlalu penting maka dari itu kami berniat mengumpulkan uang recehan dan terlalu memberatka bagi yang ingin bersedekah, semisal ibu-ibu kan bisa menyisihkan uang belanja 100 rupiah ataupun 500 rupiah, Dan sekarang alhamdulillah kita sudah bisa ikut berkorban, santunan anak yatim, menyumbangkan untuk pembangunan masjid, sekolah, memberikan pula kepada keluarga yang sudah meninggal dan lain sebagainya mbak. Kaleng-kaleng gerakan koin peduli kami sebarluaskan kepada penyandang disabilitas dan juga masyarakat umum.” (wawancara dengan ketua Difabel Blora Mustika Bapak Ghofur pada tanggal 8 Mei 2023).⁴

Kaleng-kaleng gerakan koin peduli umat disebarluaskan kepada seluruh para penyandang disabilitas dan terbuka juga untuk masyarakat umum. Dengan adanya program gerakan koin peduli umat diharapkan mampu memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

⁴ Wawancara dengan ketua Difabel Blora Mustika Bapak Ghofur pada tanggal 8 Mei 2023

Gambar 4.1: Kaleng Koin Difabel Peduli Umat oleh Difabel Blora Mustika



Sumber: Dokumentasi Penulis

7. Produk UMKM Penyandang Difabel Blora Mustika

Ekonomi kreatif termasuk dalam salah satu sektor kesohor ramah difabel. namun juga peningkatan ekonomi kreatif di Indonesia. Hingga saat ini penyandang difabel kerap dipandang sebelah mata karena kekurangan yang dimilikinya. Sehingga tidak banyak kesempatan kerja yang dibuka untuk karyawan disabilitas. Namun, di antara potret ketidaksetaraan tersebut, para penyandang disabilitas Blora Mustika justru mampu melawan arus. Mereka menciptakan produk ramah difabel yang memberikan kesempatan serta ruang kontribusi yang besar. Di antara berbagai industri ramah difabel, berikut ini 4 produk kreatif yang berkontribusi dalam pemberdayaan kaum difabel Blora Mustika sebagai berikut:

a) Batik Difabel

Penyandang disabilitas terlibat penuh dalam proses produksi pakaian Batik. Mulai dari membuat pola, mengemas, hingga produk siap dipasarkan. Prestasi penyandang disabilitas dari Batik difabel ini membuktikan jika karya penyandang difabel pada sektor ekonomi kreatif juga dapat diterima baik oleh masyarakat.

Gambar 4.2: batik Disabilitas Blora Mustika



Sumber: Dokumentasi Penulis

b) Pengrajin Anyaman Bambu dan Kain Perca Kecamatan Tunjungan

Para penyandang disabilitas di desanya bergerak dalam produk kriya, dengan menciptakan berbagai benda anyaman. Para penyandang difabel yang diberdayakan dalam industri kreatif tersebut membuat berbagai bentuk anyaman. Mulai dari Bakul nasi, tampah, cupil/ penutup kepala, dunak, keset, dan berbagai perabotan rumah tangga lainnya. Hasil karya kaum disabilitas di industri kreatif di desa Tunjungan ini diminati berbagai kalangan. Bahkan pengrajin anyaman difabel ini sehari-harinya selalu dibanjiri pesanan, baik dari perorangan maupun penjual anyaman.

Gambar 4.3: Anyaman Bambu dan Olahan Kain Perca Disabilitas Blora Mustika



Sumber: Dokumentasi Disabilitas Blora Mustika

c) Produk Herbal dan Makanan Ringan

Ia menjelaskan berbagai produk herbal dan makanan ringan tersebut termasuk keripik pangsit, singkong, pisang, jistik, untuk Yuyu, rempeyek, kue kacang, nastar, sari temulawak, kunir asem, kacang asin kopi mengkudu, teh

mengkudu dan jamu herbal diminati karena dibumbui rempah-rempah alami yang berkualitas, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas. Dengan cita rasa yang khas dan menyehatkan, berbagai hasil produk herbal dan kuliner yang dibuat para penyandang disabilitas.

Gambar 4.4: Produk Herbal dan Makanan Ringan Disabilitas Blora Mustika



Sumber: Dokumentasi Disabilitas Blora Mustika

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Karakteristik Organisasi Masyarakat Sipil Tercermin dalam Organisasi DBM

Informasi yang dapat digali dari narasumber mengenai karakteristik Organisasi masyarakat sipil tercermin dalam organisasi disabilitas Blora mustika antara lain sebagai berikut: pertama, DBM kabupaten Blora yang menginisiasi pembentukan Perda Disabilitas dengan harapan PKS dapat memperjuangkan kesejahteraan Disabilitas. Dengan adanya pembentukan Perda Disabilitas di Kabupaten Blora adalah bentuk dukungan nyata melalui kebijakan, pemberdayaan, pembinaan, dan alokasi anggaran yang proposional kepada disabilitas yang di lakukan oleh DBM Kabupaten Blora.

Kedua, DBM Kabupaten Blora mengharapkan sebuah bentuk afirmasi pemerintah Kabupaten Blora kepada penyandang disabilitas dan jaminan hak serta kesempatan kerja maupun mengabdikan dalam pemerintah dan jaminan perlindungan dari pemerintah kabupaten Blora berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang mengancam keberlanjutan para penyandang disabilitas. Ketiga, pengajuan pembentukan Perda Disabilitas dilakukan DBM Kabupaten Blora juga dilatarbelakangi oleh Perda Disabilitas yang diperlukan terkait

PERDA No. 5 Tahun 2022 tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas [JDIH BPK RI].

“Permasalahan perda disabilitas itu agak lama mbk mulai tahun 2017-2019, untuk tim kami melobi dan menemui satu persatu dewan untuk kita ajak diskusi serta pendekatan, kita juga komunikasi dan menggandeng beberapa ormas yaitu HPMI, Kamaba, Aisyiah, Anzor, Fatayat, Muslimat kita gandeng semua dalam satu forum bagaimana kita butuh sebuah peraturan daerah yang mengayomi disabilitas di kabupaten Blora”. (Wawancara dengan Bapak Ghofur pada tanggal 15 Mei 2023)¹

Selain itu, DBM mendapat dorongan dari Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kamaba, Aisyiah, Anzor, Fatayat, Muslimat, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Blora, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Hasil dari pertemuan tersebut adalah pentingnya pembentukan Perda Disabilitas di Kabupaten Blora mengingat sudah ada beberapa wilayah yang sudah memiliki Perda Disabilitas misal di Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ada Kabupaten Solo raya.⁵

DBM memperjuangkan pengakuan atas peran disabilitas dalam hak-haknya. Sehingga, Disabilitas selalu terintegasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan pemerintahan bidang pendidikan pekerjaan dan hak-hak serta pengakuan atas penyandang disabilitas. Sebab, para penyandang disabilitas telah memeberikan kontribusi yang besar terhadap corak kemanusiaan dan pembentukan karakter masyarakat Blora, menjadikan masyarakat yang toleran dan saling menghargai keterbatasan. Pengajuan Surat Permohonan Pembentukan Perda disabilitas di Blora, dilakukan oleh Ahmad Abdul Ghofur sebagai Ketua Umum Penyandang disabilitas DBM pada Tahun 2018.

2. Strategi Advokasi DBM sebagai upaya Mewujudkan Perda Disabilitas

a. Membentuk Lingkaran Inti DBM Dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Difabel Blora Mustika (DBM) adalah sebuah kelompok/ organisasi Difabel (penyandang disabilitas) seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, dalam

⁵ Sumodiningrat, Gunawan, Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999).

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara. DBM terbentuk pada tanggal 10 Oktober 2011 yang beranggotakan 9 orang aktif dan 120 data difabel, tahun 2012 bertambah menjadi 15 orang aktif seiring berjalannya waktu DBM mulai di kenal masyarakat dan pemerintah, pada tahun 2013 beranggotakan 20 difabel aktif dan menambah pengurus operator di 16 Kecamatan sekabupaten Bloro dan menambah data 250 difabel. Tahun 2014 anggota aktif bertambah menjadi 30 orang dan 350 data difabel dan 16 cabang kecamatan. Tahun 2020 semakin bertambah menjadi 639 difabel dari 16 Kecamatan kabupaten Bloro.¹

Kemudian anggota difabel DBM dari latar belakang masyarakat menengah, dari segi kemiskinan menjadi penghambat para disabilitas di kabupaten Bloro, hal ini mendapatkan kehidupan tidak layak terutama dari segi perawatan medis yang mereka butuhkan selain itu keseharian mereka sebagai petani, pedagang, penjahit, membatik dan sebagai ibu rumah tangga dll dan Disabilitas Bloro Mustika membuka Peluang usaha untuk kemandirian organisasi DBM Para penyandang disabilitas seperti adanya warung kopi, penjual minuman dingin, cukur rambut, dan tempat cucian montor, umur berkisar 29-51 tahun anggota DBM. Adapun mereka selain menjadi anggota Disabilitas Bloro Mustika juga sebagai anggota Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bloro dan terjun sebagai anggota politik dan sekarang ketua DBM Abdul Ghofur mencalon kan sebagean DPR RI di kabupaten Bloro.⁶

Disabilitas Bloro Mustika begronya sebagai aktivis difabel, DBM mendapat dorongan dari Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kamaba, Aisyiah, Ansor, Fatayat, Muslimat, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bloro, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).

Ketua Disabilitas Bloro Mustika M Abdul Ghofur berkesempatan mengikuti seleksi calon Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, setelah lolos seleksi berdasarkan

⁶ Theresia, Aprilia, Pembangunan Berbasis Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 2014).

pengumuman hasil seleksi administrasi calon Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) periode 2021-2026, Nomor : 16/KND/4/2021. Dengan nomor seleksi administrasi 115, nomor pendaftaran : KO250, Abdul Ghofur juga berharap dukungan dari bapak/ibu/saudara/saudari/rekan baik secara pribadi maupun kelembagaan untuk dapat memberikan dukungan. Abdul Ghofur juga mendirikan rumah usaha batik difabel Indonesia bersama komunitas difabel Blora, hal ini untuk memberikan ruang dan kesempatan untuk difabel bisa bekerja dan berusaha, mereka akan menjadi luar biasa bila diberikan ruang dan kesempatan untuk memiliki pekerjaan dan penghasilan serta pendidikan yang tinggi.

Anggota Disabilitas Blora Mustika juga sebagai Atlet NPCI blora Azizah adalah salah satu atlet difabel yang sudah berlaga dalam pekan paralimpic Nasional (PEPARNAS) XVI dipapua untuk cabang olahraga tolak peluru pada tahun 2021 kemaren. Atlet difabel blora juga mengikuti perpraprov 2023 kabupaten blora. NPCI Kabupaten Blora mengadakan pemanduan bakat olahraga disabilitas di dukung oleh NPCI pusat, hal ini dilakukan untuk penjangrangan bibit atlet difabel yang handal dan profesional.

b. Memilih Isu Stategis dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Terbentuknya organisasi/ komunitas Disabilitas Blora Mustika (DBM) di harapkan bisa mewakili seluruh aspirasi para penyandang difabel. Di sisi lain dari DBM melakukan advokasi kepada pemerintah kabupaten Blora dimana dapat mendorong kebijakan serta progam berkelanjutan, membangun komunikasi yang baik kepada pemerintah kabupaten Blora sebagai upaya untuk pemenuhan hak yang sama, kemudian melakukan advokasi mendorong terwujudnya perda disabilitas yang ada di kabupaten Blora.

Serta pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas yang bisa menjadikan kemandirian ekonomi dan memberi motivasi hidup agar bisa menghilangkan stigma diri dan keluarga.

Adapun selogan yang membuat mereka semangat dan aktif di DBM adalah menuju Indonesia inklusi membawa kebaikan, perubahan dan keberkahan. Artinya Pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan bisa membawa

kebaikan untuk semua orang. Serta isu yang diusung oleh disabilitas Blora mustika terkait keadilan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terkait fasilitas kesehatan yang kurang dan jarang mendapatkan adanya kesempatan dalam menyampaikan aspirasinya dan pendapat yang bisa mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan, serta mendapatkan pekerjaan bagi Meraka.

“DBM itu perlu adanya keadilan untuk pemenuhan hak-hak perlindungan penyandang disabilitas yang dimana mereka bisa berdaya dan mendapatkan kesempatan dalam menyampaikan aspirasinya, makanya DBM perlu adanya Perda Disabilitas di kabupaten Blora ini mbak”. (Wawancara dengan Ketua DBM Bapak Abdul Ghofur 15 Mei 2023).¹

Adapun yang dilakukan mekanisme dalam pertemuan bulanan anggota Difabel Blora Mustika (DBM) meliputi: Pembinaan secara rutin sebulan sekali di sekretariat Difabel Blora Mustika (DBM). Pendampingan bulanan merupakan pertemuan rutin setiap bulan para anggota Difabel Blora Mustika kepada disabilitas disekretariat untuk membahas beberapa problematika yang sudah dihadapi. Pendampingan tersebut di pandu oleh ketua Difabel Blora Mustika yaitu bapak Abdul Ghofur. Kegiatan pendampingan yaitu keagamaan, sharing dan evaluasi. Aspek bimbingan mencakup silaturahmi, pemahaman dan sharing mengenai produksi batik dan problematika lainnya. Kegiatan pada setiap tanggal 15 membahas tentang permasalahan permasalahan disabilitas dalam memproduksi batik ataupun yang lainnya. Selain itu ada kegiatan pelatihan kultum, retorika, public speaking dan lain sebagainya untuk mengasah skill disabilitas.

Diskusi hampir setiap hari di lakukan tim difabel Blora mustika untuk menentukan dan mewujudkan strategi pendampingan kepada disabilitas di kabupaten Blora terutama perempuan disabilitas dan perempuan yang pernah mengalami kusta, selain itu banyak permasalahan dan kebutuhan baru yang di temukan tim di lapangan, penguatan strategi yang di lakukan untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

c. Merancang Sasaran dan Strategi dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Dalam proses pengajuan pembentukan Perda disabilitas banyak fraksi DPRD kabupaten Blora yang mendukung karena persyaratan diterima pengajuan pembentukan Perda disabilitas kabupaten Blora adalah dengan adanya dukungan dari anggota DPRD lain sebanyak 7 anggota DPRD kabupaten Blora diantaranya dari fraksi PKB 3 anggota, fraksi PPP 3 anggota, fraksi Gerindra 1 anggota, fraksi PDI 2 anggota, fraksi partai Nasdem 1 anggota, fraksi PKS 4 anggota, fraksi DKBH 2 anggota.

Anggota DBM juga melakukan advokasi, lobi, komunikasi, kolaborasi, audiensi, amunisi dan bersejaring, tidak itu saja disabilitas Blora mustika ini bisa jadi LSM tapi kita injionya bekerja sama dengan nasional mulai dari lokal nasional sampai internasional, untuk disabilitas Blora mustika 2011-2019 bekerja sama dengan Belanda 2019 sampai sekarang disabilitas Blora mustika bekerja sama dengan inggris.

Disabilitas Blora Mustika bertemu dengan DPRD Blora untuk membahas tantang pemenuhan hak dan perlindungan perempuan disabilitas, tim disabilitas Blora mustika juga memberikan paparan pendampingan 6 kecamatan terkait penemuan permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas salah satunya bagaimana pengembangan usaha yang dimiliki perempuan disabilitas, pengurangan stigma, penanganan lumpuh layu, hingga program pemerintah yang berpihak pada disabilitas, disabilitas Blora mustika juga berharap banyak program pemerintah kedepannya bisa berpihak pada disabilitas mulai dari tingkat desa hingga tingkat daerah. Tim disabilitas Blora mustika melakukan advokasi dan koordinasi dengan dinas-dinas untuk pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan disabilitas di kabupaten Blora.

Tabel 4.6 Daftar Sasaran dalam Pembentukan Perda Disabilitas di Disabilitas Blora Mustika

No.	Sasaran	Tujuan Masing-Masing Sasaran
1.	DPR	Untuk mengesahkan Perda Disabilitas di Kabupaten Blora
2.	Bupati dan Wabub	Mendukung dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan daerah, mengenai Perda Disabilitas di Kabupaten Blora.
3.	Dinas-Dinas di Kabupaten Blora	OPD, Baznas, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Capil, Bappeda, Dinsos P3A, Dinporabudpar. Digandeng semua oleh DBM berupaya bagaimana, mereka punya progam berkaitan dengan isu disabilitas di Kabupaten Blora
4.	Ormas di kabupaten Blora	HPMI, Kamaba, Aisyiah, Ansor, Fatayat, Muslimat, PCNU, IPNU. Di gandeng semua dalam satu forum untuk menjadikan sebuah peraturan daerah yangengayomi disabilitas di Kabupaten Blora.

Sumber : Sumber: Dokumentasi Penulis

Kemudian wakapolri sekeluarga dan Bupati Blora Membantu DBM mendirikan bengkel kaki palsu untuk saudara saudari difabel yang membutuhkan. Dari disabilitas Blora mustika (DBM) juga kolaborasi dengan OPD terkait ijin pendirian bangunan tempat usaha anggota DBM, BAZNAS terkait penyaluran bantuan sembako bagi para difabel 16 kecamatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial yang sudah menyalurkan alat bantu dengar dan kursi roda, Dinas Kesehatan, Capil dll, di gandeng semua oleh DBM berupaya bagaimana mereka punya progam berkaitan dengan isu disabilitas, sesudah itu mereka bisa mengubah maiket kehidupan mereka tetapi mereka juga harus memberi gambaran yang positif kepemikiran mereka untuk memmanusiakan manusia.

Bantuan sosial yang diberikan berupa kaki palsu, alat bantu dan lain-lain yang dibutuhkan oleh para disabilitas

untuk keberlangsungan hidup mereka yang diberikan oleh dinas sosial dan pemberdayaan anak dan perempuan (P3A) guna menunjang memudahkan dalam kegiatan sehari-hari mereka. Bantuan kaki palsu sejumlah 10 yang diberikan oleh dinas sosial P3A, bantuan 5 kursi roda oleh PMI kabupaten Blora dan bantuan 2 kursi roda yang diberikan oleh Baznas.

“Bantuan ini bentuk kepedulian dari Dinas Sosial kepada difabel di DBM dengan memberikan bantuan kaki palsu, alat bantu biar dalam mengikuti membatik menjadi lebih mudah mbak (wawancara dengan bapak Ghofur selaku Ketua Difabel Blora Mustika.)”⁷

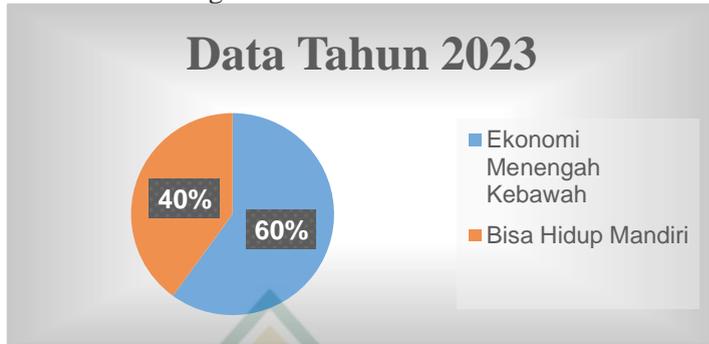
d. Mengolah Data dan Mengemas Informasi Dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Permasalahan yang dialami oleh difabel saat ini berdasarkan dari hasil pendapat masyarakat adalah mengenai adanya para disabilitas yang masih di remehkan. Masyarakat juga menjadikan keterbatasan fisik mereka sebagai tolak ukur dalam menilai kelemahan para disabilitas sehingga bisa mengakibatkan banyak aktor yang tidak mempercayakan kepada difabel. Jika dilihat dari segi ekonomi Penyandang difabel yang ada di dunia pekerjaan sangatlah terbatas atau minim, dan pada akhirnya pemilik modalpun juga tidak andil dalam memberikan kesempatan untuk para difabel menjadi karyawan mereka dengan alasan keterbatasan dan kemampuan mereka tidak terpenuhinya.

Tahun 2023 ini sudah terkumpulan anggota 700 lebih yang tersebar di 16 kecamatan jangkauan sementara yang di data disabilitas Blora mustika. Dan tarah ekonomi difabel di Blora rata-rata adalah menengah kebawah, dari hasilnya 60% mereka tidak dapat hidup mandiri dan 40% mereka bisa hidup mandiri, mereka juga aktif berkomunikasi lewat sosial media bahwa mereka mampu berkembang dan perlu adanya hak perlindungan bagi disabilitas

⁷ Wawancara dengan bapak Ghofur selaku Ketua Difabel Blora Mustika,

Gambar 4.5: Diagram ekonomi Disabilitas Blora Mustika



Sumber: Dokumentasi Rekap data global DBM dan Kecamatan

Difabel Blora mustika juga memperjuangkan hak-hak mereka sebagai penyandang difabel, sebagaimana mereka menunjukkan bahwa mereka tertindas dan kurang tersentuh oleh pihak pemerintah yang dimana mereka dalam organisasi disabilitas Blora mustika bersatu untuk memperjuangkan hak-hak dan perlindungan disabilitas sebagaimana manusia yang sempurna, disabilitas Blora mustika juga mempunyai sosialedia yaitu you tube, Facebook, instagram yang berisikan bahwa mereka menuntut pemenuhan hak-hak dan pemberdayaan disabilitas, sebagai difabel maka dari itu butuh adanya perda untuk mendukung perjuangan mereka.

Pengurus disabilitas Blora mustika ikut hadir undangan penyusunan RKPD 2023 kabupaten Blora ada beberapa usulan dari perwakilan disabilitas blora mustika 1) munculnya PERBUB terkait haka-hak dan perlindungan penyandang disabilitas kabupaten Blora, 2) tempat umum dan layanan terutama kantor-kantor pemerintah daerah dan desa aksabilitas, 3) adanya progam dan anggaran dari OPD berpihak kepada penyandang disabilitas “menuju Indonesia inklusi”

Selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada mereka terkait dengan program pemberdayaan yang akan diberikan. Sosialisasi diadakan di Sekretariat Difabel Blora Mustika, para penyandang disabilitas diberikan pengetahuan mengenai pentingnya mengikuti pemberdayaan ini, dengan mengikuti beberapa program pemberdayaan, salah satunya program membuat batik yang tujuannya untuk mengasah skill mereka. Maksud dan tujuan sosialisasi dari program

Difabel Blora Mustika, antara lain: Menjadi langkah pertama silaturahmi dan pengenalan antara pengurus Difabel Blora Mustika (DBM) dengan para penyandang disabilitas. Mensosialisasikan tujuan, maksud dan program kegiatan secara langsung sehingga dapat memberikan penjelasan secara baik, mudah dipahami dan diharapkan tepat sasaran. Dari 925.642 jiwa penduduk di kabupaten Blora terdapat 700 warga yang termasuk kategori disabilitas dari 700 warga disabilitas tersebut 40% di antaranya bisa hidup mandiri dan 60% di anatarany tidak bisa hidup mandiri.

Gambar 4.6: Perjuangan Disabilitas Blora Mustika dalam Memperjuangkan hak-haknya



Sumber: Dokumentasi Disabilitas Blora Mustika di Facebook

Gambar 4.7: Perjuangan Disabilitas Blora Mustika dalam Memperjuangkan Hak-haknya



Sumber: Dokumentasi Disabilitas Blora Mustika di You tube

Gambar 4.8: Perjuangan Disabilitas Blora Mustika dalam Memperjuangkan Hak-haknya



Sumber: Dokumentasi Disabilitas Blora Mustika di instagram

e. Praktik Menggalang Sekutu dan Pendukung Dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Untuk melancarkan proses pengajuan serta pembentukan Perda Disabilitas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melakukan lobi dan negosiasi terhadap anggota DPRD Fraksi lain bertujuan untuk mendapat pengaruh yang pasti berupa dukungan terhadap Perda Disabilitas. Kemudian Sebanyak 7 anggota DPRD kabupaten Blora diantaranya dari fraksi PKB 3 anggota, fraksi PPP 3 anggota, fraksi Gerindra 1 anggota, fraksi PDI 2 anggota , fraksi partai Nasdem 1 anggota, farksi PKS 4 anggota, fraksi DKBH 2 anggota.

“ Sebelum melakukan lobi dan menemui satu persatu dewan untuk kita ajak diskusi serta pendekatan, DBM juga menggandeng beberapa ormas yaitu HPMI, kamaba, alAisyiah, Ansor, Fatayat, Muslimat, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di gandeng semua dalam satu forum untuk menjadikan sebuah peraturan daerah yang mengayomi disabilitas di kabupaten Blora mbk”.(wawancara dengan Ketua DBM Bapak Bdul Ghofur 15 Mei 2023).¹

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melakukan pendekatan negosiasi terlebih dahulu, dimana negosiasi dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan

perbedaan karena masing masing anggota DPRD Kabupaten Blora memiliki background dan tujuan yang berbeda beda. Dalam proses pengajuan pembentukan perda Disabilitas banyak fraksi DPRD Kabupaten Blora yang mendukung. Karena persyaratan diterimanya pengajuan pembentukan Perda Disabilitas Kabupaten Blora adalah dengan adanya dukungan dari anggota DPRD lain sebanyak lebih dari 7 anggota DPRD Kabupaten Blora. Untuk itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mencari dukungan dari DPRD Fraksi lain yang juga setuju dan memiliki misi yang sama untuk mewujudkan Perda Disabilitas di Kabupaten Blora.

Dalam mencari dukungan dilakukan dengan meminta tanda tangan sebagai bukti bahwa anggota DPRD tersebut telah setuju dengan adanya Perda Disabilitas. Berikut adalah data Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora yang memiliki misi sama dengan Fraksi PKS yaitu untuk segera dibentuk Perda Disabilitas di Blora.

“Untuk strateginya banyak mbk mulai dari advokasi, melobi para dewan-dewan, komunikasi, audiensi, amunisi, kita juga tidak lupa bersejaring dengan upaya mewujudkan perda, kolaborasi dengan OPD, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, Capil dll kita juga gandeng bagaimana mereka punya progam berkaitan dengan isu disabilitas.” (Wawancara dengan Bapak Ghofur pada tanggal 15 Mei 2023)⁸

f. Data Mengajukan Rancangan Tanding Pembentukan Perda Disabilitas

Saat berlangsungnya penyampaian usulan pembentukan Perda Disabilitas tidak ada penolakan dari anggota DPRD Fraksi lain. Tentunya ini menjadi faktor pendukung yang membuat usulan Pembentukan Perda Disabilitas ini resmi masuk dalam Prolegda Tahun 2018. Karena belum masuk bab pembahasan maka DBM belum tahu pasti apakah ada penolakan atau tidak. DBM dan sudah melakukan desakan terhadap Bupati agar nantinya saat proses pembahasan Perda Disabilitas bisa memuluskan proses pembahasan Ranperda menjadi Perda Disabilitas

Selanjutnya adanya Tim Asistensi yang dibentuk oleh DBM. Tim Asistensi ini adalah bentuk dukungan nyata dari DBM karena dapat dikatakan Tim Asistensi dapat

⁸ (Wawancara dengan Bapak Ghofur pada tanggal 15 Mei 2023)

mempercepat proses pembentukan Perda Disabilitas dimana pada tahun 2019 lalu sedang dalam proses pembuatan Naskah Akademi untuk Perda Disabilitas. Tim Asistensi memberikan masukan kepada Tim Pembuat Naskah Akademik karena anggota anggota Tim Asistensi sebagian besar memiliki Disabilitas. Jadi mereka tau apa yang dibutuhkan oleh disabilitas baik bentuk anggaran maupun program kegiatan. Dibutuhkan kerja sama antara pihak DPRD Bora dan pemerintahan Sehingga nanti saat Perda Disabilitas sudah diresmikan nanti hasilnya dapat dimanfaatkan tanpa mengganggu kebijakan yang lain

DBM bersama Tim Asistensi sudah melakukan kajian terkait dengan Undang Undang Disabilitas dan tinggal menunggu PP nya untuk bisa dijadikan sebagai referensi dalam pembentukan Perda Disabilitas. Selain itu DBM juga melakukan diskusi dengan DPR RI yang membidani lahirnya Undang Undang disabilitas. Sedangkan kendala yang dialami saat melaksanakan strategi strategi tersebut seperti memanfaatkan kewenangan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bora.¹

DBM memberikan usulan isi Raperda terkait pemenuhan Penyandang Disabilitas, yang dimana kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah daerah dan masyarakat. 1) upaya pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan disabilitas, yang berhak dan berkesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan Undang-Undang, 2) Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro kecil dan menengah seperti usaha sendiri ataupun usaha, 3) Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial, untuk pengembangan kemandirian Penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga masyarakat lainnya, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, 4) Kebudayaan dan Pariwisata, setiap wisatawan Penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya, 5) olahraga, setiap Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan dan menikmati kegiatan olahraga secara aksesibel, 6) Politik dan Hukum, setiap Penyandang berhak

untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang di pilih secara bebas, 7) Aksesibilitas, pemerintah daerah kabupaten atau kota badan hukum badan usaha dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

g. Mempengaruhi Pembuat Kebijakan Dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Selain itu DPRD fraksi PKS memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan pengawalan secara ketat terhadap proses pembuatan Perda Disabilitas, untuk menunjukkan keseriusannya DBM meminta Bupati untuk memfasilitasi dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas di kabupaten Blora. Selanjutnya anggota dewan dari fraksi PKS saat melakukan pertemuan dengan anggota DPRD yang lain, kami dari DBM selalu menyinggung mengenai hak-hak disabilitas dan menegakkan Perda yang memanusiakan manusia.

Pengaruh pembuat kebijakan perda disabilitas karena Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar seperti pendapat masyarakat bahwa disabilitas itu tidak bisa apa-apa, serta adanya pengaruh dari kelompok luar untuk mendukung terwujudnya perda disabilitas di kabupaten Blora. Tim DBM mempengaruhi DPRD , fraksi PKS, PDIP, Gerindra, PKB, Bupati , dinas-dinas yang ada di Blora, masyarakat, serta Ormas yang ada di kabupaten Blora

Pembentukan peraturan daerah tentang disabilitas di Blora saat ini sedang dalam proses penyusunan yang mana Bupati yang menetapkan kebijakan rancangan Perda setelah itu mendapatkan persetujuan dari DPRD, Tentunya saat tahap perencanaan fraksi partai sejahtera membuat strategi agar tahap-tahap pembentukan berjalan sesuai rencana dan dapat segera terselesaikan dengan hasil yang maksimal dimana Perda disabilitas nantinya benar benar dapat menjawab masalah-masalah yang sedang di hadapi oleh para penyandang disabilitas.

h. Membentuk Pendapat Umum Dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Kelompok difabel tidak mampu melakukan pekerjaan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang normal. Selain itu, mereka masih menganggap

kelompok difabel lebih baik disantuni dari pada diberdayakan sehingga hal ini membuat penyandang disabilitas kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang lebih layak. Stigma-stigma negatif tentang kecacatan juga membuat para penyandang disabilitas mundur dari lingkungan orang-orang normal.

Keinginan untuk berbaur melakukan segala macam aktivitas seperti manusia pada umumnya akhirnya hanya menjadi angan-angan belaka, karena banyak dari mereka merasa malu dan tidak percaya diri dengan kondisi tubuhnya. Pada umumnya dukungan dari lingkungan sekitar bahkan orang terdekat seperti keluarga juga sangat minim. Selain itu ruang ruang publik yang tidak aksesibel juga menyulitkan penyandang disabilitas.

Propaganda Disabilitas Blora Mustika dalam mengegolkan perda diantaranya lewat sosial media seperti Ig, Facebook, you tube yang dimana mereka membuat pendapat mempengaruhi publik bahwa Mereka membutuhkan perlindungan dan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas yang dimana bisa mewujudkan perda di kabupaten Blora dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas.

“kita aktif mbak di sosial media Ig, Facebook, you tube kegiatan di DBM apa, kemaren kita juga sempat meminta dukungan di sosial media semoga perda disabilitas di kabupaten Blora segera terwujudkan, tim DBM juga memberikan semangat dan motivasi kepada saudara saudari difabel agar sabar untuk memenuhi hak” mereka sebagai disabilitas mbak”. (wawancara dengan Ketua DBM Bapak Abdul Ghofur 15 Mei 2023).⁹

i. Membangun Basis Gerakan Dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Proses penyadaran dalam pemberdayaan masyarakat menurut teori Freire yang dikutip oleh Aziz Muslim menyatakan penyadaran kepada masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah merupakan proses penyadaran awal yang harus dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui dan sadar tentang program yang akan dibicarakan. Dengan

⁹ Wawancara dengan Ketua DBM Bapak Abdul Ghofur 15 Mei 2023.

adanya musyawarah, masyarakat juga akan tergerak untuk berfikir tentang segala sesuatu yang dibicarakan, sehingga masyarakat mengetahui dan sadar tentang program yang akan dibicarakan. Proses penyadaran juga bisa diakibatkan oleh adanya interaksi dunia luar.

Sebagaimana teori Suwarsono dan Budiman yang dikutip oleh Aziz Muslim menyatakan bahwa adanya perubahan dipandang sebagai sebuah proses interaksi dengan dunia luar. Artinya kunci dari sebuah perubahan adalah adanya interaksi masyarakat dengan dunia yang maju. Disabilitas Blora mustika mempertahankan basis gerakannya dengan diadakannya musyawarah bersama kemudian tim DBM melakukan penguatan keluarga yg memiliki anak dan perempuan difabel serta membangun kesadaran sosial bahwa Meraka disabilitas yang harus terpenuhi hak-hak Meraka. serta menggandeng semu para penyandang disabilitas.

“tim DBM setiap bulannya pasti mengadakan kegiatan mbak setiap tanggal 15 kita melakukan pertemuan rutin untuk memberikan motivasi inspirasi kepada teman-teman, dan setiap tanggal 1 kita juga melakukan khataman AlQuran dan sholawat nariyah dalam bentuk untuk memperertakna silaturahmi kita mbk”. (wawancara dengan Ketua DBM Bapak Abdul Ghofur 15 Mei 2023).¹

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Dalam kegiatan untuk memberdayakan masyarakat yang berdaya dalam ekonomi, sosial, politik, atau pendidikan dirasa akan mampu mencukupi kebutuhannya, minimal kebutuhan subsisten yang meliputi kebutuhan pokok makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kehidupan masyarakat akan mendekati harmoni dan menghindari ketegangan antar individu.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat DBM dalam Memperjuangkan Perda Disabilitas Blora Mustika

Berdasarkan dari hasil penemuan penelitian dapat di lihat dari sudut pandang beberapa lajian terkait dengan permasalahan yang di alami oleh difabel di kabupaten Blora baik dari segi psikologi, sosial, maupun ekonomi.

a. Faktor Penghambat

- 1.) Adanya Penyandang Disabilitas Blora Mustika yang masih di remehkan masyarakat mengenai keterbatasan fisik mereka sebagai tolak ukur dalam menilai kelemahan difabel sehingga bisa Tidak adanya balai rehabilitas milik pemerintah
- 2.) Kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas
- 3.) Terbatasnya anggaran
- 4.) Kurangnya sumber daya manusia yang profesional
- 5.) Kesulitan dan keterbatasan fisik,kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan komunikasi dan merasa diasingkan.
- 6.) Segi kemiskinan menjadi penghambat para penyandang disabilitas blora mustika.

b. Faktor Pendukung

- 1) Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas blora mustika yang dilaksanakan melalui kesamaan kesempatan rehabilitas, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- 2) Terpenuhinya hak pendidikan maka para penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi setara dengan manusia lainya dan tidak lagi menjadi kaum termarjinalkan.
- 3) Terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas

C. Analisis Data Penelitian

1. Karakteristik Organisasi Masyarakat Sipil Tercermin dalam Organisasi DBM

Dorongan dari Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMII), Kamaba, Aisyiah, Ansor, Fatayat, Muslimat, PCNU Blora, Hasil dari pertemuan tersebut adalah pentingnya pembentukan Perda Disabilitas di Kabupaten Blora mengingat sudah ada beberapa wilayah yang sudah memiliki Perda Disabilitas misal di Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ada Kabupaten Solo. Dorongan tersebut dilakukan karena melihat banyaknya penyandang disabilitas yang kurang di perhatikan oleh pemerintah dan kurangnya pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.

Tabel 4.7 Permasalahan yang di Hadapi Disabilitas Blora Mustika

NO	Permasalahan yang di hadapi Disabilitas
1.	Sarana dan prasarana penunjang terlihat masih kurang memadai. Dimana kehidupan para penyandang disabilitas yang penuh dengan kesederhanaan dan kebersahaannya masih memerlukan tingkat kesadaran dalam melaksanakan pola hidup sehat dan bersih yang mana didorong oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta layak untuk digunakan.
2.	Kurangnya pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas maupun dari segi kesehatan, pekerjaan, pendidikan, serta yang berkaitan dengan kehidupan sosial disabilitas, dari segi ekonomi penyandang disabilitas yang ada di dunia pekerjaan sangatlah terbatas atau minim, dan pada akhirnya pemilik modalpun juga tidak andil dalam memberikan kesempatan untuk para difabel menjadi karyawan mereka dengan alasan keterbatasan dan kemampuan mereka tidak terpenuhinya standar.
3.	Permasalahan saat ini yang dialami oleh difabel adalah dari pendapat masyarakat yang masih diremehkan, masyarakat juga menjadikan keterbatasan fisik mereka sebagai tolak ukur dalam menilai kelemahan difabel sehingga bisa mengakibatkan banyak aktor yang tidak di perjakan kepada difabel
4.	Kemandirian ekonomi dalam pelembagaan dimana kebutuhan uang selalu menjadi kendala dalam melakukan aktivitas disabilitas baik dalam pengembangan maupun aktivitas keseharian difabel.

Sumber: Disabilitas Blora Mustika

Selanjutnya akhir akhir ini juga muncul dari anggapan masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak bisa apa-apa dengan kasarnya menjadi sampah masyarakat yang mengalami ketertinggalan karena kurang bisa bersaing ditengah tengah masyarakat pada era globalisasi ini. Para difabel juga jarang mendapatkan adanya kesempatan dalam menyampaikan aspirasinya dan mendapat yang bisa mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan, partisipasi difabel masih terbilang sangat minim dari berbagai kegiatan langsung berhubungan dengan pemerintah, kemudian masyarakat juga masih menjadikan para difabel sebagai objek atau sasaran penerima program dan belum

dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksana teknis dalam hidup mereka.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 11 menyatakan bahwa adanya hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu harus adanya ditindaklanjuti. Kembali kebijakan atau peraturan yang telah di terbitkan sebelumnya, tidak terjadi polemik bagi penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan disabilitas agar dapat bersaing ditengah tengah masyarakat dan terjamin kehidupannya maka DBM Kabupaten Blora menginginkan sebuah bentuk afirmasi pemerintah Kabupaten Blora kepada penyandang disabilitas dan jaminan hak serta kesempatan kerja maupun mengabdikan dalam pemerintahan dan jaminan perlindungan dari pemerintah Kabupaten Blora yang berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang mengancam keberlanjutan disabilitas. Perlindungan jaminan dan mendapat pengakuan oleh pemerintah khususnya Masyarakat Blora

Pengajuan pembentukan Perda Disabilitas yang dilakukan DBM Kabupaten Blora juga dilatarbelakangi oleh Perda Disabilitas yang diperlukan sebagai turunan dari Undang Undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas pasal 1 yang telah diresmikan pada tahun 2019 lalu.

Sejalan dengan *background* dari Partai Keadilan Sejahtera sendiri adalah partai politik islam. Upaya untuk memperjuangkan nilai nilai islam dengan mengupayaan terwujudnya Perda Disabilitas di Kabupaten Blora melalui DBM. Dimana PKS yang memiliki Misi : 1.) Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir. 2.) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat ssolusi 3.) Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. 4.) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya. 5.) Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. 6.) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan

dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi. 7.) Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas. Sedangkan visi PKS sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa.

Dalam pandangan penulis bahwasanya menguraikan dengan cermat tentang latar belakang disabilitas Blora mustika dalam memperjuangkan perda untuk menegakkan nilai-nilai sebuah perjuangan, menegakkan keadilan, pembelaan kepada kaum tertindas, menghargai akal pikiran dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan untuk memperjuangkan hal-hal tersebut, dalam keberhasilan gerakan advokasi untuk mendorong terbentuknya perda disabilitas. Oleh karena itu, DBM harus memperjuangkan agar Disabilitas mendapatkan hak hak disabilitas. Sehingga, para disabilitas selalu terintegasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan pemerintahan.

2. Strategi Advokasi DBM sebagai upaya Pembentukan Perda Disabilitas

a. Lingkaran Inti Disabilitas Blora Mustika Dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Disabilitas Blora Mustika (DBM) adalah sebuah kelompok/ organisasi Difabel (penyandang disabilitas) seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara. DBM terbentuk pada tanggal 10 Oktober 2011 yang beranggotakan 9 orang aktif dan 120 data difabel, tahun 2012 bertambah menjadi 15 orang aktif seiring berjalannya waktu DBM mulai di kenal masyarakat dan pemerintah, pada tahun 2013 beranggotakan 20 difabel aktif dan menambah pengurus operator di 16 Kecamatan sekabupaten Blora dan menambah data 250 difabel. Tahun 2014 anggota aktif bertambah menjadi 30 orang dan 350 data difabel dan 16 cabang kecamatan. Tahun 2020 semakin bertambah menjadi 639 difabel dari 16 Kecamatan kabupaten Blora

Kemudian anggota difabel DBM dari latar belakang masyarakat menengah, dari segi kemiskinan menjadi penghambat para disabilitas di kabupaten Blora, hal ini mendapatkan kehidupan tidak layak terutama dari segi

perawatan medis yang mereka butuhkan selain itu keseharian mereka sebagai petani, pedagang, penjahit, membatik dan sebagai ibu rumah tangga dll dan Disabilitas Blora Mustika membuka Peluang usaha untuk kemandirian organisasi DBM Para penyandang disabilitas seperti adanya warung kopi, penjual minuman dingin, cukur rambut, dan tempat cucian montor, umur berkisaran 29-51 tahun. Di lihat dari unsur lingkaran inti maka lingkaran inti yang terlibat proses perjuangan advokasi perda dalam artian lingkaran intinya sudah relevan dan masuk akal serta organisasi ini berhasil karena dari lingkaran utama dan faktor lain yang kuat dalam melobi jaringan politik meskipun lingkaran intinya 2 dalam pandangan penulis lingkaran Inti berkontribusi terhadap keberhasilan perjuangan pengusulan perda lingkaran inti merupakan salah satu penopang dalam perjuangan advokasi yang sangat fundamental di bangun oleh disabilitas Blora mustika mendukung keberhasilan dan menjadi faktor penentu keberhasilan dari gerakan advokasi disabilitas blora mustika dalam mendorong perda disabilitas.

Tabel 4.8 Organisasi Lingkaran Inti Disabilitas Blora Mustika

No	Organisasi Lingkaran Inti	Lobi
1.	HPMI	Di gandeng semua dalam satu forum untuk menjadikan sebuah peraturan daerah yang mengayomi difabel dan pentingnya pembentukan perda Disabilitas di Kabupaten Blora, mengingat sudah ada beberapa wilayah yang sudah memiliki Perda Disabilitas.
2.	HMI	
3.	Kamaba	
4.	Aisyiah	
5.	Ansor	
6.	Fatayat	
7.	Muslimat	
8.	PCNU	
9.	IPNU	

Sumber : Disabilitas Blora Mustika

b. Isu Strategi dalam Pembentukan Perda Disabilitas

DBM melakukan advokasi kepada pemerintah kabupaten Blora dimana dapat mendorong kebijakan serta program berkelanjutan, membangun komunikasi yang baik kepada pemerintah kabupaten Blora sebagai upaya untuk pemenuhan hak yang sama, kemudian melakukan advokasi mendorong terwujudnya perda disabilitas yang ada di kabupaten Blora. Serta pelatihan keterampilan untuk

penyandang disabilitas yang bisa menjadikan kemandirian ekonomi dan memberi motivasi hidup agar bisa menghilangkan stigma diri dan keluarga.

Adapun slogan yang membuat mereka semangat dan aktif di DBM adalah menuju Indonesia inklusi membawa kebaikan, perubahan dan keberkahan. Artinya Pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan bisa membawa kebaikan untuk semua orang. Serta isu yang diusung oleh disabilitas Blora mustika terkait keadilan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terkait fasilitas kesehatan yang kurang dan jarang mendapatkan adanya kesempatan dalam menyampaikan aspirasinya dan pendapat yang bisa mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan, serta mendapatkan pekerjaan bagi Meraka.

Isu dalam pembentukan Perda Disabilitas terkait adanya keadilan untuk pemenuhan hak-hak perlindungan penyandang disabilitas yang dimana mereka bisa berdaya dan mendapatkan kesempatan dalam penyampaian aspirasinya yang perlu adanya Perda Disabilitas di Kabupaten Blora. Dalam pandangan penulis bawasannya memilih isu strategis atas pemenuhan hak-hak Perlindungan penyandang disabilitas dalam artian tuntutan yang semakin luas di masyarakat agar isu tersebut segera ditangani, jika tidak akan membawa dampak negatif lebih besar pada kehidupan penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Blora. Dan akan berdampak positif pada perubahan kebijakan publik yang mengarah pada perubahan kepada Penyandang Disabilitas yang lebih baik. Berikut adalah gambaran hasil isu strategi dalam pembentukan perda.

Tabel 4.9 Isu Strategis dalam Pembentukan Perda Disabilitas

No	Isu Strategis
1.	Perlu adanya keadilan untuk pemenuhan hak-hak perlindungan penyandang disabilitas.
2.	Terpenuhinya hak pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dll, Penyandang disabilitas akan memberikan kesempatan untuk Penyandang disabilitas untuk menjadikan setara dengan manusia lainnya dan tidak menjadikan kaum termarjinalkan
3.	Pemberdayaan, jaminan dan perlindungan social

Sumber : Dokumentasi Penulis

c. Merancang Sasaran dan Strategis Dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Anggota DBM juga melakukan advokasi, lobi, komunikasi, kolaborasi, audiensi, amunisi dan bersejaring, tidak itu saja disabilitas Blora mustika ini bisa jadi LSM tapi kita injionya bekerja sama dengan nasional mulai dari lokal nasional sampai internasional, untuk disabilitas Blora mustika 2011-2019 bekerja sama dengan Belanda 2019 sampai sekarang disabilitas Blora mustika bekerja sama dengan inggris.

Disabilitas Blora Mustika bertemu dengan DPRD Blora untuk membahas tantang pemenuhan hak dan perlindungan perempuan disabilitas, tim disabilitas Blora mustika juga memberikan paparan pendampingan 6 kecamatan terkait penemuan permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas salah satunya bagaimana pengembangan usaha yang dimiliki perempuan disabilitas, pengurangan stigma, penanganan lumpuh layu, hingga progam pemerintah yang berpihak pada disabilitas, disabilitas Blora mustika juga berharap banyak progam pemerintah kedepannya bisa berpihak pada disabilitas mulai dari tingkat desa hingga tingkat daerah. Tim disabilitas Blora mustika melakukan advokasi dan koordinasi dengan dinas-dinas untuk pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan disabilitas di kabupaten Blora

DBM bersama Bappeda Blora berdiskusi untuk penanganan terhadap anak disabilitas yang membutuhkan alat bantu selain itu kerjasama tim DBM dengan Bappeda sudah di lakukan selama 10 tahun lebih hingga 4x ganti kepemimpinan. Tim DBM melakukan koordinasi dan audiensi di dinas perindustrian dan tenaga kerja terkait hak-hak perempuan disabilitas yang selama ini terabaikan dan jarang tersentuh, salah satu tujuan tim melakukan audiensi adalah adanya progam dan anggaran dari pemerintah daerah yang berpihak kepada perempuan disabilitas melalui pelatihan pemberdayaan untuk kemandirian

Sinergitas DBM dengan dinas sosial P3a untuk menyalurkan alat bantu dengar dan kursi roda dari Wakapolri untuk membantu saudara/di difabel yang membutuhkan, audiensi serta koordinasi juga dilakukan dengan dinas PMD kabuapten Blora yang melibatkan perempuan disabilitas dalam prog desa, Tim DBM berharap

besar semua balai desa khususnya di kabupaten Blora akses disabilitas dan melibatkan 2% Penyandang disabilitas dalam progam desa, selain itu melibatkan dalam mumdes dan musdus di desa.

Dalam pandangan penulis bahwasanya Disabilitas Blora Mustika sejauh ini sudah cukup signifikan saat menjalankan strategi-strategi dalam mengupayakan terbentuknya perda disabilitas di Kabupaten Blora, seperti memanfaatkan kewenangan, fungsi legislasi DPRD Kabupaten Blora, melakukan sosialisasi Undang-undnag disabilitas, sosialisasi lewat media sosial untuk membentuk opini publik positif tentang Perda disabilitas, praktik lobi dan negoisasi terhadap anggota DPRD fraksi lain untuk ikut mengusung pembentukan Perda disabilitas di Kabupaten Blora. Berikut adalah gambaran hasil dukungan anggota fraksi DPRD Kabupaten Blora.

Tabel 4.10 Dukungan anggota Fraksi DPRD Kabupaten Blora

No	Fraksi	Jumlah
1.	PKB	3
2.	PPP	3
3.	Gerindra	2
4.	PDI	4
5.	Nasdem	2
6.	PKS	4

Sumber: Dokumentasi Disabilitas Blora Mustika

d. Mengolah Data dan Mengemas Informasi dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Permasalahan yang dialami oleh difabel saat ini berdasarkan dari hasil pendapat masyarakat adalah mengenai adanya para disabilitas yang masih di remehkan. Masyarakat juga menjadikan keterbatasan fisik mereka sebagai tolak ukur dalam menilai kelemahan para disabilitas sehingga bisa mengakibatkan banyak aktor yang tidak mempercayakan kepada difabel. Jika dilihat dari segi ekonomi Penyandang difabel yang ada di dunia pekerjaan sangatlah terbatas atau minim, dan pada akhirnya pemilik modalpun juga tidak andil dalam memberikan kesempatan untuk para difabel menjadi karyawan mereka dengan alasan keterbatasan dan kemampuan mereka tidak terpenuhinya.

Selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada mereka terkait dengan program pemberdayaan yang akan diberikan. Sosialisasi diadakan di Sekretariat Difabel Blora Mustika, para penyandang disabilitas diberikan pengetahuan mengenai pentingnya mengikuti pemberdayaan ini, dengan mengikuti beberapa program pemberdayaan, salah satunya program membuat batik yang tujuannya untuk mengasah skill mereka. Maksud dan tujuan sosialisasi dari program Difabel Blora Mustika, antara lain: Menjadi langkah pertama silaturahmi dan pengenalan antara pengurus Difabel Blora Mustika (DBM) dengan para penyandang disabilitas. Mensosialisasikan tujuan, maksud dan program kegiatan secara langsung sehingga dapat memberikan penjelasan secara baik, mudah dipahami dan diharapkan tepat sasaran. Dari 925.642 jiwa penduduk di kabupaten Blora terdapat 700 warga yang termasuk kategori disabilitas dari 700 warga disabilitas tersebut 40% di antaranya bisa hidup mandiri dan 60% di antaranya tidak bisa hidup mandiri.

Oleh karena itu DBM memanfaatkan sosial media khususnya Facebook, Instagram, you tube untuk menyebarkan informasi yang dimana masyarakat harus tau bahwa penyandang disabilitas perlu adanya hak-hak perlindungan penyandang disabilitas. Dari survei peneliti mengemas data dengan advokasi yang mementingkan manfaat praktis dari semua data informasi yang dihasilkan tujuannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dan mengolahnya menjadi informasi yang di perlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam proses advokasi sebagai proses legislasi untuk keperluan lobi dan kampanye dalam mewujudkan Perda Disabilitas. Berikut adalah gambaran hasil mengemas informasi dalam pembentukan Perda disabilitas.

Tabel 4.11 Mengemas Informasi dalam Pembentukan Perda Disabilitas

No	Informasi	Mengolah Data
1.	Disabilitas yang masih di remehkan	Pendapat masyarakat
2.	Perjuangan Disabilitas Blora Mustika dalam Memperjuangkan hak-haknya	Sosial media berupa Facebook, Instagram, you tube

Sumber: Dokumentasi Penulis

e. Praktik Menggalang Sekutu dan Pendukung dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Untuk melancarkan proses pengajuan serta pembentukan Perda Disabilitas Fraksi Partai keadilan Sejahtera melakukan lobi dan negosiasi terhadap anggota DPRD Fraksi lain bertujuan untuk mendapat pengaruh yang pasti berupa dukungan terhadap Perda Disabilitas. Kemudian Sebanyak 7 anggota DPRD kabupaten Blora diantaranya dari fraksi PKB 3 anggota, fraksi PPP 3 anggota, fraksi Gerindra 1 anggota, fraksi PDI 2 anggota , fraksi partai Nasdem 1 anggota, farksi PKS 4 anggota, fraksi DKBH 2 anggota.

Menggalang sekutu dan pendukung yang banyak terlibat dalam proses perjuangan mengadvokasi perda, dalam pandangan penulis ikut berkontribusi terhadap keberhasilan pengusulan perda disabilitas Sebelum melakukan lobi dan menemui satu persatu dewan untuk kita ajak diskusi serta pendekatan, DBM juga menggandeng beberapa ormas di kabupaten Blora yaitu HPMI, Kamaba, Aisyiah, Ansor, Fatayat, Muslimat dll di gandeng semua dalam satu forum untuk menjadikan sebuah peraturan daerah yang mengayomi disabilitas di kabupaten Blora.

Dalam strategi proaktif, setidaknya ada tiga skema yang bisa dicoba (Pratomo, 2015). Pertama, lobi, merupakan komunikasi informal atau tersirat untuk mempengaruhi elit-elit pejabat utama pengambil keputusan. Upayanya biasanya dilakukan melalui pertemuan pribadi, telepon, surat, organisasi, ataupun aktor politik. Kedua, dengar pendapat (*public hearing*), merupakan upaya mendengarkan penjelasan, biasanya aktor advokasi menginisiasi adanya dengar pendapat dengan pengambil keputusan, ataupun sebaliknya, ada sosialisasi dari pengambil keputusan kepada masyarakat atau pihak terkait. Ketiga, kampanye, memainkan peran strategis dalam membangun dukungan publik. Dalam hal ini, jejaring dengan media massa.

Tabel 4.12 Daftar Menggalang Sekutu

No	Cara Menggalang Sekutu	Sasaran	Hambatan
1.	Melobi, komunikasi, audiensi	Anggota DPRD, fraksi PKS, fraksi Gerindra,	Sulit di temui dari anggota

		Fraksi PKB, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI.	Fraksi DPRD
2.	Digandeng semua dalam satu forum untuk menjadikan sebuah peraturan daerah yang mengayomi disabilitas	HPMI, Aisyiah, Fatayat, Ansor, Muslimat, PCNU	Tidak ada
3.	Melakukan advokasi dan koordinasi	Dinas Sosial, Baznas, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Capil, OPD, Bappeda, dll	Tidak ada

Sumber: Dokumentasi Penulis

f. Mengajukan Rancang Tanding Pembentukan Perda Disabilitas

Saat berlangsungnya penyampaian usulan pembentukan Perda Disabilitas tidak ada penolakan dari anggota DPRD Fraksi lain. Tentunya ini menjadi faktor pendukung yang membuat usulan Pembentukan Perda Disabilitas ini resmi masuk dalam Prolegda Tahun 2018. Karena belum masuk bab pembahasan maka DBM belum tahu pasti apakah ada penolakan atau tidak. DBM dan sudah melakukan desakan terhadap Bupati agar nantinya saat proses pembahasan Perda Disabilitas bisa memuluskan proses pembahasan Ranperda menjadi Perda Disabilitas

Selanjutnya adanya Tim Asistensi yang dibentuk oleh DBM. Tim Asistensi ini adalah bentuk dukungan nyata dari DBM karena dapat dikatakan Tim Asistensi dapat mempercepat proses pembentukan Perda Disabilitas dimana pada tahun 2019 lalu sedang dalam proses pembuatan Naskah Akademi untuk Perda Disabilitas. Tim Asistensi memberikan masukan kepada Tim Pembuat Naskah Akademik karena anggota anggota Tim Asistensi sebagian besar memiliki Disabilitas. Jadi mereka tau apa yang dibutuhkan oleh disabilitas baik bentuk anggaran maupun program kegiatan. Dibutuhkan kerja sama antara pihak DPRD Blora dan pemerintahan Sehingga nanti saat Perda

Disabilitas sudah diresmikan nantihasilnya dapat dimanfaatkan tanpa mengganggu kebijakan yang lain.

Tabel 4.13 Daftar Usulan Raperda Disabilitas

No	Usulan	Isi
1.	Pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan disabilitas	Berhak dan berkesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan Undang-Undang,
2.	Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah	Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro kecil dan menengah seperti usaha sendiri ataupun usaha,
3.	Pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial	Untuk pengembangan kemandirian Penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga masyarakat lainnya, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya,
4.	Kebudayaan dan pariwisata	Setiap wisatawan Penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya,
5.	Olahraga	Setiap Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan dan menikmati kegiatan olahraga secara aksesibel,
6.	Politik dan hukum	Setiap Penyandang berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang di pilih secara bebas,
7.	Aksesibilitas	Pemerintah daerah kabupaten atau kota badan hukum badan usaha dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

Sumber : file Usulan Raperda Disabilitas Blora Mustika tahun 2014

Dalam pandangan penulis bahwasannya praktik menggalang sekutu ini cukup relevan dan masuk akal terkait rancang Tanding usulan Raperda Disabilitas ini berhasil karena dari sirkel utamanya sudah kuat dalam usulan Raperda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjalankan fungsi legislasinya dengan mengajukan pembentukan Perda inisiatif. Perda inisiatif yang dimaksud yaitu pengajuan pembentukan Perda Disabilitas Kabupaten Blora. Pengajuan pembentukan perda disabilitas yang diinisiasi oleh DBM ini memiliki persiapan yang sangat matang. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Blora memiliki 6 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam lembaga legislatif, DPRD DBM Kabupaten Blora memiliki cukup kekuatan untuk mendorong pembentukan Perda Disabilitas, Ini dibuktikan dengan Rancangan Perda Disabilitas yang diresmikan masuk dalam prolegda tahun 2018. Keputusan tersebut disetujui bersama sama oleh kepala daerah atau Bupati Blora untuk menjadi Perda, rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Bapak Santoso Budi selaku ketua DPRD dari Fraksi PKS Kabupaten Blora.

Berdasarkan pembahasan dan masukan dalam hasil rapat perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas baik dari segi materi muatan, teknik penulisan dan teknik penyusunan guna memberikan kepastian dalam memenuhi hak penyandang Disabilitas.

g. Mempengaruhi Pembuat Kebijakan dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Pembentukan peraturan daerah tentang disabilitas di Blora saat ini sedang dalam proses penyusunan yang mana Bupati yang menetapkan kebijakan rancangan Perda setelah itu mendapatkan persetujuan dari DPRD, Tentunya saat tahap perencanaan fraksi partai sejahtera membuat strategi agar tahap-tahap pembentukan berjalan sesuai rencana dan dapat segera terselesaikan dengan hasil yang maksimal dimana Perda disabilitas nantinya benar benar dapat menjawab masalah-masalah yang sedang di hadapi oleh pera penyandang disabilitas.

Selain itu DPRD farksi PKS memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan pengawalan secara ketat terhadap proses pembuatan Perda Disabilitas, untuk

menunjukkan keseriusannya DBM meminta Bupati untuk memfasilitasi dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas di kabupaten Blora. Selanjutnya anggota dewan dari fraksi PKS saat melakukan pertemuan dengan anggota DPRD yang lain, dari DBM selalu menyinggung mengenai hak-hak disabilitas dan menegakkan Perda yang memanusiakan manusia.

Sebagai salah satu syarat agar usulan pembentukan Perda Disabilitas diterima dan masuk Prolegda maka harus ada dukungan dari anggota DPRD Blora yang lain sebanyak tujuh anggota DPRD Blora. Untuk itu DBM melakukan lobi dan negosiasi kepada anggota DPRD Blora agar nantinya saat rapat pengajuan usulan pembentukan Perda Disabilitas menuju Prolegda dapat berjalan dengan lancar serta mendapat dukungan yang pasti dari DPRD yang lain.

Dalam pandangan penulis bahwasanya di lihat dari langkah-langkah pembuat kebijakan berhasil dalam proses perjuangan mengadvokasi perda sebelum melakukan pelobian, DBM terlebih dahulu melakukan negosiasi untuk menyatukan tujuan dalam pembentukan Perda Disabilitas, menghilangkan perbedaan karena masing masing anggota DPRD Blora dengan *backgroun* partai yang ber beda beda.

DBM berhasil melakukan lobi dan negosiasi kepada anggota DPRD Kabupaten Blora dengan bukti banyaknya yang mendukung usulan pembentukan Perda Disabilitas menuju ke tahap selanjutnya yaitu masuk dalam Prolegda tahun 2018. Setelah melakukan lobi dan negosiasi berdasarkan lampiran yang peneliti dapatkan dari DBM terdapat 12 anggota DPRD Kabupaten Blora yang memiliki satu Visi yaitu mengusung adanya pembentukan Perda Disabilitas di Kabupaten Blora sebagai turunan dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang disabilitas. Berikut adalah anggota DPRD Fraksi yang ikut mengusung diantaranya Budi Susanto dari Fraksi PKS. Dari dukungan 12 anggota DPRD Kabupaten Blora diatas telah memenuhi syarat dan pengusulan pembentukan Perda Disabilitas disetujui serta masuk dalam Prolegda tahun 2018.

Tabel 4.14 Bentuk Pengaruh Pembuat Kebijakan

No	Bentuk Pengaruhnya	Upaya	Subjek yang di pengaruhi
1.	Tekanan dari luar pendapat masyarakat bahwa disabilitas tidak bisa apa-apa	Tim DBM melakukan pertemuan 1 bulan sekali dalam upaya mengurangi stigma-stigma negatif dan memotivasi para disabilitas	Disabilitas Blora Mustika
2.	Mereka tertindas dan kurang tersentuh oleh pihak pemerintah	DBM bersatu untuk memperjuangkan hak-hak dan perlindungan disabilitas sebagai manusia yang sempurna	Disabilitas Blora Mustika dan Pemerintah

Sumber: Dokumentasi Penulis

h. Pendapat Umum dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Propaganda Disabilitas Blora Mustika dalam mengegolkan perda diantaranya lewat sosial media seperti Ig, Facebook, you tube. Dalam pandangan penulis bahwasanya propaganda Disabilitas Blora Mustika dalam menggolkan perda cukup berhasil karena dari sirkel utamanya sudah kuat di lintas sektor dan sosial media yang mempengaruhi publik bahwa Meraka membutuhkan perlindungan dan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas yang dimana bisa mewujudkan perda di kabupaten Blora dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas.

Kelompok difabel tidak mampu melakukan pekerjaan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang normal. Selain itu, mereka masih menganggap kelompok difabel lebih baik disantuni dari pada diberdayakan sehingga hal ini membuat penyandang disabilitas kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang lebih layak. Stigma-stigma negatif tentang kecacatan juga membuat para penyandang disabilitas mundur dari lingkungan orang-orang normal.

Keinginan untuk berbaur melakukan segala macam aktivitas seperti manusia pada umumnya akhirnya hanya menjadi angan-angan belaka, karena banyak dari mereka merasa malu dan tidak percaya diri dengan kondisi tubuhnya. Pada umumnya dukungan dari lingkungan sekitar bahkan orang terdekat seperti keluarga juga sangat minim. Selain itu ruang ruang publik yang tidak aksesibel juga menyulitkan penyandang disabilitas.

Partai Keadilan Sejahtera adalah satu dari beberapa Partai Politik Islam di Indonesia. Pemikir islam yang terkenal yaitu Sir Muhammad Iqbal menguraikan dengan cermat tentang politik islam, dimana politik islam adalah upaya upaya untuk menegakkan nilai nilai islam dalam kehidupan kemasyarakatan yang terpusat pada keadilan. Artinya Islam tampil sebagai sebuah perjuangan untuk menegakkan keadilan, pembelaan kepada kaum tertindas, menghargai akal berpikiran dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk memberjuangkan hal hal tersebut politik islam bisa ditempuh melalui jalur partai politik.

Tabel 4.15 Pendapat Umum dalam Pembentukan Perda Disabilitas

No	Pendapat Umum yang ingin dibentuk	Cara membentuk pendapat umum	Media yang digunakan
1.	DBM bisa bekerja dengan keterbatasan mereka	Lewat sosial medi	You tube, Instagram, facebook
2.	DBM membutuhkan perlindungan dan hak-hak sebagai penyandang disabilitas	Lewat sosial media	You tube, Instagram, facebook

Sumber: Dokumentasi Penulis

i. Membangun Basis Gerakan dalam Pembentukan Perda Disabilitas

Sebagaimana teori Suwarsono dan Budiman yang dikutip oleh Aziz Muslim menyatakan bahwa adanya perubahan dipandang sebagai sebuah proses interaksi dengan dunia luar. Artinya kunci dari sebuah perubahan adalah adanya interaksi masyarakat dengan dunia yang

maju. Dalam pandangan penulis bahwasanya membangun basis gerakan di bangun oleh Disabilitas Blora Mustika yang berpotensi menjadi faktor pendukung keberhasilan dari gerakan advokasi dan langkah strateginya masuk akal dalam mendorong perda disabilitas di Kabupaten Blora, Disabilitas Blora mustika mempertahankan kan basis gerakannya dengan di adakannya musyawarah bersama kemudian tim DBM melakukan penguatan keluarga yg memiliki anak dan perempuan difabel serta membangun kesadaran sosial bahwa Meraka disabilitas yang harus terpenuhi hak-hak Meraka. Serta menggandeng semu para penyandang disabilitas.

Tabel 4.16 Basis Gerakan Disabilitas Blora Mustika

No	Basis gerakan	Strategi
1.	Mengadakan pertemuan setiap tanggal 15 untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada difabel	Di gandeng semua dalam satu forum untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai disabilitas
2.	Dan setiap tanggal 1 melakukan khataman Qur'an dan sholawat nariyah bersama	Di gandeng semua dalam satu forum untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai disabilitas

Sumber: Dokumentasi Penulis

Proses penyadaran dalam pemberdayaan masyarakat menurut teori Freire yang dikutip oleh Aziz Muslim menyatakan penyadaran kepada masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah merupakan proses penyadaran awal yang harus dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui dan sadar tentang program yang akan dibicarakan. Dengan adanya musyawarah, masyarakat juga akan tergerak untuk berfikir tentang segala sesuatu yang dibicarakan, sehingga masyarakat mengetahui dan sadar tentang program yang akan dibicarakan Proses penyadaran juga bisa diakibatkan oleh adanya interaksi dunia luar.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat DBM dalam Memperjuangkan Peda Disabilitas

a. Faktor Penghambat

Adanya Penyandang Disabilitas Blora Mustika yang masih di remehkan masyarakat mengenai keterbatasan fisik mereka sebagai tolak ukur dalam menilai kelemahan difabel sehingga bisa mengakibatkan banyak actor yang tidak dipercayakan kepada difabel. M, Tidak adanya balai rehabilitas milik pemerintah Kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Terbatasnya anggaran. Kurangnya sumber daya manusia yang profosional. Kesulitan dan keterbatasan fisik,kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan komunikasi dan merasa diasingkan.Segi kemiskinan menjadi penghambat para penyandang disabilitas blora mustika.

b. Faktor Pendukung

Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas blora mustika yang dilaksanakan melalui kesamaan kesempatan rehabilitas, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Terpenuhinya hak pendidkan maka para penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi setara dengan manusia lainya dan tidak lagi menjadi kaum termarjinalkan. Terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas